

JARINGAN KEARSIPAN KESULTANAN: KASUS SUMENEP DAN PONTIANAK *THE WEB OF SULTANATES' ARCHIVES: CASE STUDY SUMENEP AND PONTIANAK*

Raistiwar Pratama

Arsiparis

Arsip Nasional Republik Indonesia

Email: sastrapratama@yahoo.co.id

Abstract

Ever since the Government of Netherlands Indie ruled in 1816, archival policy and practice was began to support any administrative activities. Thus why many recruited employees and recorded information was gained during that previous time at least until the end of nineteenth century. That sort of recording activity happened in three level: bottom, middle and upper. At the bottom level, the local chiefs giving reports. At the middle level, the local rulers making agreements (sultan and resident); and at the upper level, the higher officials in Batavia and The Hague (Gouverneur Generaal and Minister van Colonie).

The information exchange among those three levels not much being paid attention by the historians and archivists. Historians were concerned more to write and rewrite historiography, relate it to any kind of historical sources. Archivists were much more concerned to make finding aids, making it relevants as much as possible to the creating agency. Those information nodes have roots and branches that connected the agents. This is how global agents made their policies and how local agents made their responds.

Agreements between the local rulers, in this case Sumenep and Pontianak, with Batavia were happened in the middle level. It connected between what happened in the rurals with global ruling elites. What interesting best is not only how the both sides corresponded to each other but how archival practices of the Sultanates supported the agreements, how western archival tradition influenced and how the Sultanates responded in doing so. Sumenep and Pontianak survived even after mid nineteenth century and the Sultans chose to corporate with the officials via series of correspondences. That was the time when manuscripts and archives live in the same time. Both were different in style of writing, languages, structures and creators. Else stays the same.

Keywords: *manuscript, recorded information, information exchange*

Abstrak

Pada periode kekuasaan pemerintah East Indie tahun 1816, kebijakan tentang kearsipan dan kegunaannya bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan administratif. Oleh karena itu, banyak staf yang diperkerjakan pada masa itu menyimpan dan mengumpulkan arsip-arsip dari masa lalu sampai kemudian pada periode akhir abad ke-19. Kegiatan pengumpulan arsip ini dilaksanakan melalui tiga tingkatan, yaitu tingkat bawah, menengah dan tingkat atas. Pada tingkat bawah, pimpinan lokal menyampaikan laporan. Pada tingkat menengah, pimpinan daerah lokal mengadakan kesepakatan (antara sultan dan resident); dan pada tingkat atas, pejabat tinggi di Batavia dan di Den Haag (Gubernur Jenderal dan Menteri Koloni). Pertukaran Informasi yang terjadi di dalam tiga tingkat tersebut seringkali tidak diperhatikan oleh para sejarawan dan arsiparis. Para sejarawan hanya memperhatikan mengenai penulisan atau menuliskan kembali historiografi dan membuat hubungan tentang hal yang dituliskannya dengan sumber-sumber sejarah. Para arsiparis hanya memperhatikan bagaimana membuat sarana temu balik dan memperhatikan relevansinya dengan organisasi penciptaan. Terlepas dari hal tersebut, informasi yang terkandung dalam hubungan tiga tingkatan tersebut memiliki arti yang sangat penting karena mereka dapat berperan sebagai sumber dan penghubung kepada agen-agen pelaku utama. Informasi tersebut dapat menghubungkan secara global dan kita dapat melihat bagaimana kebijakan dibuat dan bagaimana para pimpinan di daerah merespon kebijakan tersebut. Contoh kasus adalah kesultanan Sumenep dan Pontianak., dimana para pemimpin lokal di daerah tersebut membuat kesepakatan dengan pihak asing. Hal yang menarik adalah para pihak yang bekerja sama tak hanya saling berhubungan dalam tindakan, tetapi juga praktek-praktek kearsipan yang menjelaskan hubungan tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan tersebut. Kita dapat melihat bagaimana pengaruh barat mempengaruhi kegiatan kearsipan di kesultanan bahkan setelah abad ke-19 ketika sultan melakukan kerja sama dengan pejabat di Batavia melalui korespondensi. Kita dapat melihat gaya, bahasa, struktur dan penciptaan surat sangat dipengaruhi oleh barat.

Kata kunci: *manuskrip, Informasi yang terekam, pertukaran informasi*

Pelbagai dunia bersua dalam surat-surat kerajaan Melayu. Pada tataran yang paling mudah terlihat, surat-surat itu melambangkan pertemuan antara Timur dan Barat, karena kebanyakan warkah diplomatik berbahasa Melayu yang tersisa ternyata terjalin antara para penguasa negeri-negeri setempat di Asia Tenggara kepulauan dan kalangan raja-raja Eropa atau para pejabat kompeni-kompeni besar Eropa. Namun surat-surat Melayu juga dapat dipandang sebagai jagat kecil peradaban Nusantara, yang menyajikan informasi tentang hubungan politik, diplomatik dan ekonomi, afiliasi keagamaan, corak kesusastraan, tata-cara surat menyurat, dan kepekaan seni. (Annabel Teh Gallop, Prakata untuk Mu'jizah, Iluminasi dalam Surat-Surat Melayu Abad ke-18 dan ke-19, 2009)

PENDAHULUAN

Untuk pertama kalinya, pada 1992, khazanah surat emas mulai terbit. Berbeda dari anggapan umum bahwa surat emas merupakan manuskrip, maka dari itu merupakan bagian dari kepustakaan, dus manuskrip itu buku; penerbitnya bukan merupakan lembaga kepustakaan, tetapi justru lembaga kearsipan. Secara serba ringkas, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerbitkannya dalam “Katalog Seabad Pameran Kearsipan”. Enam tahun kemudian, ANRI kembali melakukan hal

yang sama. Sedikit lebih lengkap dari terbitan sebelumnya, kali ini berjudul “The Gedung Arsip Nasional through the Ages”. Terbitan ketiga mengemuka pada awal 2015. “Khazanah Arsip Nusantara; *Exclusive Heritage of the Archipelago*” (selanjutnya, Khazanah) hadir lebih lengkap daripada dua terbitan sebelumnya. Pembahasan Khazanah tidak hanya menelisik corak dan warna iluminasi, keunikan segel merah (rode laken), tetapi juga deskripsi singkat, mencakup para pihak yang terlibat (baik nama penguasa maupun nama kesultanan) dan dua titimangsa (hijriyah dan masehi). Pengelompokkan pada Khazanah, kami lakukan berdasarkan letak geografis, kami bagi per pulau: Sumatera, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, serta Maluku dan Nusa Tenggara Barat.

Ketiga terbitan tersebut tidak bermaksud mengaitkan peristiwa dan pemahaman utuh atas keterhubungan jaringan informasi pada waktu itu, bahkan nyaris terjebak menjadi table book dan cenderung antiquarian. Akan tetapi sebagai perkenalan bahwa kawasan yang khalayak umum kenal sebagai nusantara ini juga melakukan perilaku kearsipan sebelum berkembangnya pengaruh kearsipan Barat, terutama tonggak modern yang Dutch Manual mulai, merupakan “*what is past is prologue*”.

Tentu saja bagi filolog yang kadung akrab dengan manuskrip, sulit menganggap arsip sebagai manuskrip; ataupun sebaliknya, para arsiparis sulit menerima

manuskrip sebagai arsip. Padahal apabila filolog dan arsiparis melakukan kajian yang jalin berkelindan, niscaya cibiran pada manuskrip sebagai historiografi tradisional dan menjauh dari historiografi modern tidaklah sepicik itu. Historiografi yang kelak mengemuka justru kajian utuh dari kedua belah pihak, dalam hal ini penguasa pribumi dan penguasa asing (baca Kompeni [VOC] atau Pemerintahan Hindia-Belanda melalui *Algemeene Secretarie, Binnenlandsch Bestuur*, atau *het Kantoor voor Inlandsche Zaken*) karena keduanya merekam kejadian pada sumber primer. Historiografi itulah yang Michael Cummings dan Nancy K. Florida gagas, bahwa sumber primer baik dari Barat maupun Timur sama-sama berguna. Setiap sumber saling melengkapi, selama kritik sumber tetap berlaku.

Sebelum Undang-Undang 43/2009 tentang Kearsipan menerakan bahwa arsip adalah "... rekaman kejadian dalam berbagai bentuk", Undang-Undang 7/1971 tentang Pokok-Pokok Kearsipan justru mengawali definisi arsip, baik dinamis maupun statis, dengan "...naskah-naskah". Sepintas saja kita ketahui bahwa definisi arsip mulanya begitu sederhana lalu berubah menjadi serba-semua. Apabila rentang waktu tigapuluh dasawarsa pada pergantian abad, sepanjang 1971 – 2009, definisi arsip mengalami perluasan makna, maka kajian kearsipan pada kurun waktu Abad XVIII dan XIX, tentu jauh lebih sederhana dan secara berlaku-surut definisi

kearsipan terbaru dapat menjelaskan keadaan ini. Dus, berikut merupakan kajian kearsipan pada perilakunya yang masih sangat sederhana dan tentu saja tidak sepelik kajian kearsipan dewasa ini.

Pada akhir 2012, Direktorat Pengolahan ANRI menerbitkan Guide Arsip Perdagangan Global di Hindia Timur (selanjutnya, Guide). Berbeda sama sekali dari tiga kajian tadi, Guide menyajikan kajian heuristik sedapat mungkin sesuai konteksnya. Guide merupakan sarana bantu temu kembali sekunder (*secondary finding aids*) yang amat bergantung pada ketersediaan sarana bantu temu kembali primer (*primary finding aids*): daftar dan inventaris. Kedua jenis sarana bantu temu kembali tersebut merupakan dasar utama penyusunan guide, tanpa keduanya tidak mungkin penyusunan guide dapat kami lakukan. Guide tersebut menguraikan deskripsi arsip mengenai beras, budak, candu, cengkeh, garam, gula, kayu, kayumanis, kopi, merica, nila, pala, dan tambang (perak, emas, timah, dan besi) pada suatu masa setelah "*Age of Commerce*" sebagaimana Anthony Reid sebut, sepanjang abad ketika *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) berperan sebagai pedagang perantara dan penengah seteru antarpenguasa lokal; pada masa memudarnya kewirausahaan lokal dan ketergantungan pada kapitalisme asing. Sementara itu hingga 2015 ANRI belum menerbitkan naskah sumber yang mengkaji peristiwa bersejarah atau penulisan ulang

dan penerjemahan sumber-sumber sejarah (dalam hal ini surat-surat emas atau manuskrip) pada abad XVIII dan XIX. Selama ini penerbitan naskah sumber lebih berpusat pada tema-tema yang menarik secara politis pada abad XX, seperti Sarekat Islam Lokal, Haji, Banjir, dan lain-lain. Itu pun lebih pada khazanah kearsipan Pemerintahan Hindia-Belanda, terutama pada seri *Memorie van Overgave* (MvO) dan *Politieke Verslag*, bukan pada khazanah kearsipan kesultanan. Biasanya manuskrip tersebut merupakan lampiran pada dokumen terkait. Manuskrip itu diterjemahkan, ditulis ulang, dan dijawab.

Kiranya penyusunan keempat terbitan tersebut dapat memudahkan para pengguna menelusuri arsip terkait, dan tentu saja memahami latar belakang secara lebih berimbang, serta bagaimana sumber primer dari kedua belah pihak dipahami, tidak melulu arsip tetapi juga manuskrip. Hal ini juga memberitahu para pengguna bahwa ANRI tidak hanya menyimpan arsip berbahasa Belanda tetapi juga manuskrip atau surat emas yang sebagian berbahasa Melayu dan beraksara Arab serta sebagian kecil berbahasa daerah setempat. Surat-surat dari penguasa pribumi tersebut, lalu Pemerintahan Hindia-Belanda yang melalui wewenang *Binnenlandsch Bestuur* (Kementerian Dalam Negeri), *Inheemse Bestuur*, dan *Algemeene Secretarie* (Sekretariat Negara) terjemahkan, salin, dan jawab.

Betapa menarik pernyataan

Annabel The Gallop (2009) bahwa ANRI merupakan lembaga penyimpanan (repository) manuskrip terbanyak, lalu disusul Perpustakaan Universitas Leiden dan *Koninklijke Instituut Taal-, Land-, en Volkenkunde* (KITLV). Menarik karena bagi sebagian besar orang, ANRI bukanlah merupakan lembaga penyimpanan manuskrip. Pandangan tersebut mengemuka acapkali karena anggapan bahwa manuskrip merupakan bentuk awal atau bentuk lain dari buku, dan buku bukanlah arsip, karena arsip bukan cetakan yang berulang. Perdebatan yang berputar pada bentuk kemasan bukan isi informasi (*content*) dan kesezamanan (*contemporary*).

Ketiga tempat itulah—kini setelah 2014, khazanah KITLV telah disimpan di Bibliotheek Universiteit Leiden—menurut Gallop, merupakan repository (tempat penyimpanan) terpenting “dokumen naskah Melayu”. Secara sederhana, menurut *Society of American Archivists* (SAA) *repository* merupakan tempat di mana sesuatu disimpan dan dirawat, tempat penyimpanan (*a place where things can be stored and maintained; a storehouse*) (<http://www2.archivists.org/glossary/terms/r/repository>). Lebih lanjut, SAA menguraikan *manuscript repository* sebagai sebuah lembaga yang mengumpulkan rekaman bernilai sejarah dari orang, keluarga, dan organisasi yang bersumber selain dari organisasi yang menggerakkan lembaga tersebut (*an institution that collect historically valuable records of individuals,*

families, and organizations from sources other than the organization that operates the institution) (<http://www2.archivists.org/glossary/terms/m/manuscript-repository>).

Apabila memang demikian adanya, maka penulis tertarik untuk mengkaji gagasan kearsipan yang khas Nusantara sebelum kehadiran Eropa, sebelum Dutch Manual pada 1898. Selain sebagai repository, ANRI juga berperan sebagai custodian. Memang keberadaan ANRI merupakan lanjutan dari Landsarchief. Khazanah Landsarchief sebagian besar merupakan khazanah Hoge Regering yang membawahi VOC. Menurut SAA, custodian merupakan “*The individual or organization having possession of and responsibility for the care and control of material,*” (<http://www2.archivists.org/glossary/terms/c/custodian>). Landsarchief mewariskan khazanah berbahasa Belanda dari Hoge Regering dan *Algemene Secretarie*, serta berbagai departemen bentukan Pemerintahan *Nederlandsch Indie* (Hindia Belanda) seperti *Mijnwezen*, *Burgerlijke Openbare Werken*, *Wees- en Boedelkamers*, *Binnenlands Bestuur*, dan ragam *archieven residentie* kepada ANRI; maka wajar saja ANRI pun menjadi ahli waris dari manuskrip atau naskah atau surat emas. Kedua fungsi itulah, ANRI sebagai lembaga penyimpanan dan terwaris, sekaligus untuk arsip dan manuskrip yang kelak memberikan pandangan heuristik dari kedua belah pihak, asing dan lokal.

PEMBAHASAN

1. Manuskrip bagi Kearsipan

Dalam *Glossary dari A Modern Archives Reader; Basic Readings on Archival Theory and Practice* (Daniels and Walch [eds.], 1984: 341), manuskrip adalah “*a handwritten or typed document, including a letterpress or carbon copy, or any document annotated in handwriting or typescript.*” Manuskrip juga merujuk pada “berkas pribadi”, “kumpulan dokumen yang diciptakan pribadi atau keluarga”. Definisi tersebut lebih menekankan bentuk bukan isi, padahal sebagaimana definisi arsip terbaru—sesuai UU 43/2009—bahwa arsip “...rekaman kejadian dalam berbagai bentuk.” Jadi pada dasarnya manuskrip juga arsip. Lalu—apabila memang ada—di manakah letak perbedaannya? Apa saja perbedaannya?

Society of American Archivist (SAA) menerakan tiga ragam definisi manuskrip (<http://www2.archivists.org/glossary/terms/m/manuscript>). Pertama, dokumen bertulis tangan (*a handwritten document*), sebagaimana kita saksikan pada dokumen proklamasi (Pratama, 2012) dan teks mundur diri Soeharto pada Mei 1998. Kedua, dokumen tidak diterbitkan, sebagaimana salah satu versi Supersemar yang ANRI dapatkan dari lampiran memoir M. Yusuf. Ketiga, draf tulisan baik berupa buku maupun artikel, ataupun terbitan lainnya. *International Council on Archives* (ICA) dalam *Dictionary of Archival*

Terminology pun menerakan definisi serupa. Manuskrip adalah:

“a handwritten or typed document. A typed document is more precisely called a typescript; - manuscripts - documents of manuscript character usually having historical or literary value or significance. The term is variously used to refer to archives, to artificial collections of documents acquired from various sources usually according to a plan but without regard to provenance, and to individual documents acquired by an archives because of their significance; See also: papers, records.”

Untuk terjemahan berbahasa Indonesia, definisi serupa dapat kita temui dalam Terminologi Kearsipan Indonesia (Suhardi, Hardi; dan Daryana, Yayan [eds.], 1998) dan Terminologi Kearsipan Nasional (Hadiwardoyo, Sauki [ed.], 2002.). Kedua buku itu singkat saja menerakan definisi manuskrip dan manuskrip sastra. Definisi verbatim dari ICA dan SAA.

Lalu apa yang bisa kita pahami mengenai manuskrip berdasarkan pelbagai rujukan yang kita kutip? Bahwa manuskrip pun serupa arsip, bahkan manuskrip itulah arsip. Kehadiran manuskrip terjadi lebih awal daripada arsip, hanya saja manuskrip mulai mengemuka seiring hubungannya yang jalin berkelindan dengan arsip antara pemerintahan asing dengan pemerintahan

setempat (misalnya, Kesultanan Pontianak dan Sumenep). Manuskrip karena kesamaan media berupa kertas, serupa sekali dengan arsip. Para pedagang Eropa terutama Belanda lewat *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) dan Inggris lewat *East Indie Company* (EIC) yang “memperkenalkan” manuskrip dan “mengaitkan” dengan arsip. Sebagaimana tulis Hendrik E. Niemejer dalam *The Diplomatic Correspondence between Asian Rulers and Batavia castle during the 17th and 18th centuries; The Digital Reconstruction of a Lost Treasure* (ANRI and the Corts Foundation, 2015: 3):

The correspondence between Asian rulers and Batavia Castle was systematically catalogued during the 17th and 18th centuries, likewise on the basis of the ‘contractenboeken’. The letters were not only archived in outgoing and incoming letter books, but also the Dutch translations of the original letters from Asian rulers, were inserted in the VOC’s principle: the Daily Journals of Batavia Castle”

2. Kearsipan Sebelum *Dutch Manual*

Seabad *Dutch Manual*, Terry Cook memperingatinya dengan menulis esai panjang berjudul “*What is Past is Prolog; A History of Archival Ideas since 1898, and the Future Paradigm Shift*”. Lebih dari sekali, Cook menyebut *Dutch Manual* sebagai kitab suci (*bible*) bagi arsiparis dan pada 1898 itu titimangsa teori kearsipan

bermula. John Ridener pun memperluas uraian Cook dalam tesisnya yang dibukukan berjudul *From Polders to Postmodernism; A Concise History of Archival Theory. Bagi Cook dan Ridener, archival theory* sejalan dengan *archival ideas*. Lalu apa saja perbedaan *archival ideas* dan *archival mind*?

Baik Cook maupun Ridener menempatkan pembakuan perumusan, keteraturan, dan kemungkinan sebagai titimangsa kearsipan modern. Petra M. Sijpesteijn (2006, 163 – 165) menggagas *archival mind* sebagai sesuatu yang lebih sederhana daripada teori kearsipan. Kesederhanaan itu mencakup perekaman (*recordness*), penyimpanan (*repository*), pemberkasan (*fling*), penilaian dan pemilahan (*appraisal and selection*), serta penamaan istilah (*glossary*). Ketiadaan Arsip Negara (*state archives*) bukanlah suatu kekurangan. Bagi Sijpesteijn justru merupakan “... *the archival mind at its most diligent and industrious*”. Oleh karena ketika itu, istana (*chancellery, diwan al insha*), lembaga pajak (*diwan al kharaj*), lembaga keagamaan, dan perusahaan keluarga juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan meskipun hanya sementara.

Dalam Qanun *diwan al rasail*, terdapat penanggung jawab atas mempersiapkan jawaban, menjawab, dan menyimpan petisi dan keluhan; serta melacak semua dokumen yang masuk, mempersiapkan fihrist, mencatat surat masuk dan surat keluar setiap

hari, dan menerjemahkan dokumen yang tidak-berbahasa Arab. Khazin-lah yang bertanggung jawab atas itu semua. Sebagaimana kita ketahui khazanah merupakan padanan dari *collection* atau *collectie*, yang terserap dari bahasa Arab. Khazin merupakan penanggung jawab atas khazanah.

Meskipun demikian perilaku kearsipan tersebut terjadi pada Abad XV, ketika “... *Islam in its maturity*,...” Bagaimana dengan masa sebelumnya? Sijpesteijn menyatakan apa yang dia sebut sebagai *record-keeping habit*, sudah terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah II, Umar bin Khaththab pada 634 – 644 M. Pada masa awal itu, Umar melakukan pengumpulan pajak dan pembayaran tunjangan prajurit (termasuk kelahiran, kematian, dan kedatangan) berdasarkan catatan. Demikianlah, prinsip-prinsip kearsipan Islam pasti juga memasuki kedua Kesultanan (Sumenep dan Pontianak), tanpa menutupi pula di kesultanan lain.

Membantah Michael Chamberlein bahwa “*documentary culture was, in fact, superfluous*,” keadaan kearsipan di Timur Tengah tidak lebih baik daripada Utsmaniyah. Sekalipun memang Utsmaniyah begitu sepenuh hati menata dokumen dan bahkan menyimpan kopi ketiga (*triplicate copies*), hal demikian tidak didapati di Timur Tengah; Sijpesteijn justru berujar bahwa sebelum Utsmaniyah berdiri, di Timur Tengah, Mesir tepatnya sudah mapan, “... *the archival mind*

at its most diligent and industrious.” Bagi Sijpesteijn, record-keeping habit merupakan sebetulnya archival mind yang menyimpan daftar orang dan kepemilikan, record books, ledgers, dan registers.

Dari Perdagangan Ke Administrasi

Bubarnya VOC, memindahkan kebijakan yang semula berpusat pada perdagangan, walaupun terjadi penguasaan atas suatu wilayah itu pun semata untuk kepentingan perdagangan, lalu beralih pada administrasi. Kurun peralihan itu terjadi sepanjang 1808 – 1816, sejak Daendels lalu Raffles memimpin. Pada 19 Agustus 1816, tiga tahun setelah Perancis memberikan Belanda kemerdekaan, ketika Inggris “mengembalikan” kekuasaan atas Hindia Timur kepada Belanda, maka pencatatan, penulisan, dan perekaman pada kertas, peta, statistik pun mulai marak. Kebijakan yang mengemuka sejak itu memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, Belanda dan Hindia-Belanda—nama baru yang menggantikan Hindia Timur.

Apa yang paling membedakan kedua periode tersebut? Pengangkatan pegawai yang khusus melakukan tugas administrasi merupakan perihalan yang paling kentara. Tidak pernah sebelumnya pada periode Hindia Timur, para petugas administrasi begitu banyak melayani negara, bukan hanya para pemodal dan pedagang, bahkan hingga wilayah

pedalaman. Sebelumnya pegawai Kompeni cukup bertemu dan bersepakat dengan para penguasa setempat, seperti raja, sultan, atau patih; lalu mekanisme pemerintahan tidak langsung hasil kesepakatan tersebut begitu saja diterapkan. Tidak hanya itu, serangkaian instrumen pun Pemerintah siapkan untuk menyediakan informasi yang mencukupi dan memadai. Pertukaran informasi antara Batavia dengan The Hague juga berimbas pada tataran lokal di kepulauan. Para kepala pemerintahan setempat, seperti residen pun menambah jumlah pegawai untuk melakukan statistik tahunan kependudukan, sosial, dan kewilayahan (Jeurgens, 2012). Pentingnya sumber tangan-pertama merupakan ujung tombak memadainya suatu informasi yang kelak disampaikan kepada The Hague. Sekalipun informasi berbahasa setempat tersebut diterjemahkan dan seringkali tidak dilampirkan dengan terjemahannya namun keseriusan aparat penguasa untuk memberikan laporan berkala mengenai banyak hal sesuai permintaan The Hague, semakin meneguhkan kepentingan administrasi pemerintahan. Sebagaimana tulis Jeurgens (2012), bahwa “The information sent from Batavia to The Hague depended fully on the quality of the chain that connected Batavia with to the inner areas in the archipelago. The colonial state continuously tried not only to control and extend the information structures, but also the quality and amount of information that was exchanged.”

Ujung tombak mata rantai tersebut terletak pada "... the chain that connected Batavia with the inner areas in the archipelago." Apabila pada surat dari kepala kampung atau pemimpin setempat saja mendapatkan perhatian yang memadai sebagai suatu rekaman informasi, maka kedudukan manuskrip yang ditulis para penguasa kesultanan tentu saja lebih berarti. Bukan hanya sebagai lampiran, tetapi memetakan bagaimana jaringan pertukaran informasi bercabang dan terhubung. Pemahaman bahwa informasi atau lebih tepatnya rekaman informasi merupakan suatu yang dinamis perlu mengemuka. Maka dari itu kajian atas jaringan pertukaran informasi yang jalin berkelindan, berlapis dan bercabang perlu terus mengemuka. Salah satunya melalui apa yang penulis sebut sebagai kearsipan kesultanan.

Lebih daripada jaringan pertukaran informasi, penulis juga ingin menelisik perilaku kearsipan yang terjadi di kesultanan tersebut, dalam hal ini Sumenep dan Pontianak. Kedua kesultanan tersebut mewakili Jawa dan luar Jawa. Penulis meyakini kegiatan perekaman kejadian, penyimpanan, dan penyediaan rekaman tersebut juga terjadi di kesultanan, baik karena tradisi sebelumnya (terutama Islam) maupun pengaruh Belanda. Dengan kata lain, tidak hanya terjadi pertukaran informasi, tetapi juga pertukaran praktek kearsipan. Perubahan, pengurangan dan penambahan, butir-butir kesepakatan antara

kedua belah pihak jelas membutuhkan sarana bantu temu balik yang cepat dan memadai. Catatan (*minuut*) setiap pertemuan juga merupakan rekaman sezaman yang menyertai bundel rekaman kegiatan.

Sumenep, 11 Mei 1876

Menurut Annabel Teh Gallop, khazanah manuskrip Sumenep merupakan khazanah langka yang Perpustakaan KITLV (kini dalam pengelolaan Perpustakaan Universitas Leiden) simpan. Khazanah manuskrip Sumenep merupakan satu-satunya khazanah yang pada kurun Abad XIX yang masih tersimpan. Kegiatan surat-menyurat antara Pemerintahan Inggris lewat Thomas Stanford Raffles dan Pemerintahan Hindia-Belanda lewat para gubernur jenderalanya dengan penguasa Sumenep, salah satu kesultanan di Madura selain Pamekasan, merupakan sumber primer yang tersimpan dalam keadaan utuh. Selain di Belanda, manuskrip yang penulis kaji juga ANRI simpan (Khazanah, 2014: 104 – 105, Mu'jizah, 2009: 20, 106 - 109).

Surat ini merupakan kiriman Panembahan Nata Kesuma di Bangkalan kepada *Gouverneur Generaal* (GG) John Willem van Lansberger pada 11 Mei 1876 (Mu'jizah, 2009: 106). Pada waktu itu struktur pemerintahan berganda-tidak langsung (*dual-indirect rule system*) bersandar pada *inheemse bestuur* dan pemerintahan setempat. Jaringan informasi

yang tercipta antara keduanya dapat terlihat dari tingkat perkembangan (*ontwikkeling stadium*).

Semestinya Kesultanan Sumenep lewat Panembahan Nata Kusuma sebagai pengirim menyimpan apa yang disebut sebagai per tinggal, *Inheemse bestuur* dan *Algemeene Secretarie* lewat *van Lansberger* menyimpan surat yang asli, dan para pihak selain keduanya—seperti para pangeran yang ikut mendampingi—menyimpan tembusan atau salinan. Oleh karena Sumenep—yang mestinya menyimpan per tinggal—tidak memiliki tempat penyimpanan (*repository*) atau dugaan saya hilang, maka jaringan informasi dapat kita lacak pada *Landsarchief* yang kini khazanahnya ANRI kelola. Kedudukan *Landsarchief* yang merupakan *repository* dari *Algemeene Secretarie* dapat penulis duga menyimpan, baik asli maupun salinan surat tersebut, termasuk dari *Binnenlandse Bestuur*. Salinan lainnya juga tersimpan di Belanda karena *Minister van Colonie* yang berhubungan dengan *Algemeene Secretarie*.

Berikut merupakan transliterasi yang Mu'jizah (2009, 106) lakukan:

Bahwa inilah waraqat al ikhlash wa tuhfat al anfas yang terbit daripada fu'ad al zakiyah, termaktub di dalamnya beberapa tabe dan dihias dengan beberapa hormat yang tiada berhingga pada tiap-tiap masa dan ketika serta melengkap atas beberapa

kebijakan dan kemuliaan yang senantiasa adanya, yaitu daripada yang diperhamba Paduka Panembahan Nata Kusuma, Nederlandse leeuw, Bupati yang beristirahat al khair di dalam daerah Negeri Sumeneb, apalah kiranya disampaikan oleh Tuhan seru sekalian alam, dijunjungkan ke bawah cerpu duli Sri Paduka yang amat mulia dan yang arif bijaksana laksana s-r-y-a-w-a-n Yang Dipertuan Besar Gubernur Gurnadur Jenderal atas Tanah Hindia Nederland Mister Johan Willem van Lansberge yang terhias dengan bintang pertama komandur bahaduri singa Nederland, dan opsir bahaduri Luxemburg orde dari eikenroon, dan grootkruis bahaduri Franz Joseph van Oostenrijk, dan bahaduri Leopold orde dari Belgie, komandur der orde bahaduri Heilig Michail van Bayern van s-h-r-y-ng-r leeuw van b-d-h, komandur met ster dari orde bahaduri Isabel la Catholica van s-p-a-b-w-h, dan Opsir van Legioen van Eer bahaduri Frankrijk, yang bersemayam di atas takhta kerajaan dan kebesaran di negeri Betawi. Maka dipohonkan pula atas daripada usia umur zamannya minta dilanjutkan di dalam sehat dan afiat selama-lamanya jua adanya.

Wa ba'dahu kemudian daripada itu maka adalah dengan segala hormat

yang diperhamba menjunjungkan sekeping nubdhah yang se-dharrah ini ke bawah cerpu Duli Sri Paduka Yang Dipertuan Besar daripada menyatakan tulus dan ikhlas serta mentakidkan pertambahan dan perhubungan berkasih-kasihan jua adanya. Lain tiada hanya sanya yang diperhamba merafakkan ini waraqat al-musyarrifah peri bermaklumkan yang diperhamba empunya putra yang pertama yaitu Pangeran Arya Mangkudiningrat Letnan Kolonel Komandan Barisan Sumeneb supaya dikaruniai pangkat Raja Pangeran Adipati Arya dengan pakai nama Nataningrat.

Maka daripada sebab itu dengan beribu-ibu yang diperhamba mohon ampun duli Sri Paduka Yang Dipertuan Besar akan murka Sri Paduka Yang Dipertuan Besar yang diperhamba unjuk keberanian permohonan itu pangkat sebab di Bangkalan telah lama yang dapat itu pangkat Pangeran Adipati saudara dari Panembahan Bangkalan terhitung telah 8 tahun waktu Tuan l-m-r-t-r van Torenberg menjadi Resident Pulau Madura.

Maka di atas perihal yang demikian itu ialah yang diperhamba amat sangat kepingin yang supaya yang diperhamba boleh sama-sama dengan Bangkalan karena tentu Kanjeng Gubernement

Sumeneb dengan Bangkalan. Syahdan pula yang diperhamba dahulu ia pakai itu nama Pangeran bapak Sultan Pakunataningrat Sumeneb ia sama-sama juga dengan Bangkalan waktu masa hidupnya yang diperhamba empunya hajat dan dengan maksud itulah adanya.

Maka disudahinya akhir satar ini lain tiada melainkan Yang Diperhamba kedua Yang Diperhamba empunya istri Ratu Ada menjunjungkan tabik dan hormat ke bawah cerpu duli Sri Paduka Yang Dipertuan Besar akan tetap dan kekal selama-lamanya adanya.

Termaktub pada 11 hari bulan Mei 1876, dan pada 21 bulan Rabiul-thani sanat 1293

Sebagaimana tersurat pada paragraf pertama baris kedua (“... Pangeran Arya Mangkudiningrat Letnan Kolonel Komandan Barisan Sumeneb supaya dikaruniai pangkat Raja Pangeran Adipati Arya dengan pakai nama Nataningrat.”) dan ketiga (“Syahdan pula yang diperhamba dahulu ia pakai itu nama Pangeran bapak Sultan Pakunataningrat Sumeneb ia sama-sama juga dengan Bangkalan waktu masa hidupnya”), Panembahan Nata Kusuma meminta kepada van Lansberger untuk memberikan gelar Nataningrat untuk

anaknyanya, Pangeran Arya Mangkudiningrat.

Surat ini sebagaimana sebagian besar surat dari penguasa pribumi secara struktur terdiri dari tiga bagian: prolog, isi, dan penutup. Prolog terdapat pada paragraf pertama dan kedua. Isi terdapat mulai kalimat terakhir paragraf kedua hingga keempat. Penutup terdapat pada bagian keempat yang menyatakan terima kasih atas kesudian membaca dan sudi mempertimbangkan. Surat ini berbahasa Melayu dan beraksarakan Arab. Terdapat beberapa kata serapan, seperti Yang Dipertuan Besar Gurnadur Jenderal, komandur; kata yang dipertahankan dari bahasa Belanda, seperti orde, eikenroom, grootkruis. Seperti umumnya surat dari penguasa pribumi, terdapat segel merah dan hiasan iluminasi lainnya pada surat ini.

Pontianak, 11 November 1886

Pada akhir abad XVIII, tepatnya pada 23 Oktober 1771, Kesultanan Pontianak berdiri seraya mempertahankan kerjasamanya dengan Pemerintahan Hindia-Belanda. Pada awal abad XIX, terjadi tiga kesepakatan antara Belanda dan Inggris untuk membagi wilayah Borneo menjadi dua: Utara dan Selatan. Untuk Hindia-Belanda, Pemerintah membaginya kembali menjadi dua: Borneo Barat (*Westersafdeling van Borneo* atau *Borneo's Westersafdeling*) dan Borneo Tenggara (*Zuid- en Oostersafdeling van Borneo*).

Kedekatan Pontianak dengan

Belanda terlihat ketika Belanda atas permintaan Pontianak, membantu Pontianak menaklukkan Tayan pada 1817. Kedatangan pejabat resmi Pemerintah setahun kemudian pun mendapatkan sambutan resmi yang meriah (Heidhues, 1998). Terutama karena kegiatan yang James Brook lakukan, sejak 1846, Pemerintah mulai melakukan kegiatan administratif seperti pemetaan dan perbatasan wilayah. Tersebutlah tiga pejabat yang melakukan itu: D. van Kessel, C. M Schwaner, dan J. J. K Enthoven sejak medio hingga akhir abad XIX. Selama itu pula, Pemerintah juga menengahi konflik antara Tionghoa dan Dayak (ANRI, 1999; Eilenberg, 2012: 83).

Sebentuk pernyataan terima kasih itu tersurat pada surat bertanggal 11 November 1886 (atau 13 Safar 1304 H) di bawah ini. Sultan Syarif Yusuf al Qadri bersurat kepada Gubernur Jenderal Otto van Rees menyatakan terima kasih karena pemberian bintang kebesaran dari Kerajaan Belanda pada 9 Juli 1886 dan disampaikan Residen Borneo Barat tujuhbelas hari kemudian.

Berikut merupakan transliterasi yang Mu'jizah (2009: 121) lakukan:

Qawluhu al haqq

Bahwa ini waraqat al ikhlas wa tuhfah al ajnas yang terbit daripada fu'ad al zakiiyyah yang diiringi dengan beberapa tabik hormat dan selamat

begitu banyak yaitu barang diwasilkan oleh Tuhan seru sekalian alam apalah kiranya datang menghadap ke hadapan majelis Ayahanda yang mulia lagi bangsawan yaitu Sri Paduka Yang Dipertuan Besar Gubernur Jenderal atas tanah Hindia Netherland, Otto van Rees, yang terhiasai dengan komandur bintang bahaduri singa Netherland, bersemayam di atas takhta kerajaan dan kebesaran di negeri Betawi. Maka mudah-mudahan barang dilanjutkan Allah usia umur zamannya di dalam sehat dan afiat selamat sejahtera selama-lamanya jua adanya.

Wa ba'dahu daripada itu maka adalah Anakda Sultan Syarif Yusuf ibn Almarhum Sultan Syarif Hamid al Qadri yang terhiasi dengan bintang bahaduri singa Netherland di negeri Pontianak bermaklumkan seperti waraqat al musyarafah Sri Paduka Ayahanda yang mulia yang termaktub pada tanggal 9 hari bulan Juli tahun 86 telah sudah disampaikan oleh Sri Paduka Tuan Residen sebelah barat Pulau Borneo pada hari 26 bulan Juli itu juga bersama-sama kurnia yang maha tinggi oleh Sri Baginda Maharaja Olanda yaitu bintang bahaduri singa Netherland. Maka Anakda junjung dengan sepenuh-penuhnya serta dengan beberapa kesukaan yang tiada terhingga serta

Anakda permuliakan dengan beberapa kemuliaan yang sedapat-dapatnya Anakda permuliakannya,

Syahdan lagi yang Sri Paduka Ayahanda yang mulia sudah bertimbang selamat di atas Anakda, maka Anakda banyak menerima kasih serta menjunjunglah dengan sepenuh-penuhnya dengan tiada sekali-kali melupakan adanya. Lain tiada pada akhir satar ini hanyalah dipercintakan Sri Paduka Ayahanda yang maha mulia di dalam sehat dan selamat sejahtera yang berkekalan selama-lamanya jua adanya.

Termaktub di dalam istana Anakda di negeri Pontianak pada 13 hari bulan Safar sanat 1304 bersamaan pada 11 hari bulan November tahun 1886.

Pada surat tersebut menerakan beberapa hal yang menarik. Secara struktur, surat itu bersusun tiga: prolog pada paragraf pertama yang berisikan pepujian kepada penerima surat, lalu inti surat pada paragraf ketiga dan keempat yang menyatakan terima kasih, dan penutup pada paragraf keempat yang menyatakan waktu penulisan baik bertahun Masehi maupun Hijriah. Segel merah dan keunikan ilmunasi lainnya merupakan bagian terkait. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa Melayu dan beraksarakan hijaiyah. Terlihat pula beberapa kata serapan seperti Sri

Baginda Maharaja Olanda, Sri Paduka Yang Dipertuan Besar Gubernur Jenderal atas tanah Hindia Nederland, dan Betawi bukan Batavia.

Sayangnya tingkat perkembangan surat ini pada tingkat item, kehilangan keutuhannya dengan tingkat perkembangan di atasnya. Belum penulis pula dapat letak surat ini sebagai lampiran dari fonds apa. Meski mungkin saja surat ini dari khazanah Binnelands Bestuur, tetapi masih perlu penelusuran lanjutan.

KESIMPULAN

Perlu penelusuran lanjutan untuk mengetahui tingkat perkembangan dan fonds atas kedua surat tersebut, dan surat-surat kesultanan (termasuk kesepakatan politis, kontrak dagang) lainnya. Apabila pengolahan khazanah Binnenlands Bestuur rampung, maka—bersama dengan khazanah Algemeene Secretarie—kemungkinan tersebut terbuka lebar. Pengolahan dokumen hanya pada tingkat item, dapat menghilangkan keseluruhan unit pencipta arsip. Pengolahan mesti tertuju pada informasi, bukan hanya pada data (seperti sejarawan) bukan hanya pada kemasan dan keunikan ekstern dokumen (seperti filolog). Sarana bantu temu kembali berupa daftar dan inventaris dapat menjadi akses menuju simpul pemersatu bangsa. Perkembangan kearsipan di Indonesia dewasa ini bukan hanya datang dari Belanda tetapi juga berasal dari tradisi penulisan setiap kesultanan yang tersebar

di berbagai pulau.

Lembaga kearsipan melalui para arsiparisnya mesti melacak keterkaitan jejaring pertukaran informasi, tidak berhenti pada penyusunan sarana bantu temu kembali. Apabila penelusuran kelembagaan pencipta arsip berlanjut, mulai hulu hingga hilir; maka kelak terlihat jaringan kearsipan sebelum kemerdekaan Indonesia yang terlihat pada hubungan sultan-residen, sultan-gubernur jenderal, dan gubernur jenderal-menteri koloni. Perilaku kearsipan tersebut dapat menjadi model keterhubungan yang berakar dan bercabang pada dewasa ini.

Sumenep dan Pontianak merupakan contoh yang baik, bagaimana keduanya melakukan kegiatan administratif yang bersandarkan pada kebijakan dan perilaku kearsipan yang saling memengaruhi, bagaimana kepulauan dapat terhubung melalui jejaring pertukaran informasi yang berkala dan berjenjang, dan bagaimana negeri induk-negeri jajahan (Batavia dan banyak *residentie*) memelihara keterhubungan. Kedua surat tersebut memang tidak dapat menjadi sampel yang mewakili, tetapi keduanya sedikit memperlihatkan keterhubungan itu. Arsip Nasional Republik Indonesia tidak hanya mewarisi khazanah yang Landsarchief berikan, tetapi juga memetakan jejaring pertukaran informasi tersebut sebagaimana gagasan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional Republik Indonesia. 1992. Pameran Seabad Kearsipan.
- , 1998. *The Gedung Arsip Nasional through the Ages*.
- , 1999. *Inventaris Arsip Borneo's Westerafdeeling*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- , 2012. *Guide Arsip Perdagangan Global di Hindia Timur*.
- , 2015. *Khazanah Arsip Nusantara; Exclusive Heritage of the Archipelago*.
- Arsip Nasional Republik Indonesia dan The Corts Foundation. 2015. *The Diplomatic Correspondence between Asian Rulers and Batavia Castle during the 17th and 18th centuries; the Digital Reconstruction of a Lost Treasure*. Jakarta.
- Cummings, Michael. 2007. *The Makassarese Chronicles of Gowa and Talloq*. Leiden: KITLV Press.
- , 2010. *The Makassar Annals*. Leiden: KITLV Press.
- van den Doel, H. W. 1994. *De Stille Macht; het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera 1808 – 1942*. Amsterdam; Uitgeverij Bert Bakker.
- Eilenberg, Michael. 2012. *At the Edges of the States; Dynamics of State Formation in the Indonesian Borderlands*. Leiden: KITLV Press.
- Florida, Nancy K. 2003. *Menyurat yang Silam Menggurat yang Menjelang; Sejarah sebagai Nubuat di Jawa Masa Kolonial*. Translated. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Hadiwardoyo, Sauki (ed.). 2002. *Terminologi Kearsipan Nasional*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Handi, Suhardi; dan Daryan, Yayan (eds.). 1998. *Terminologi Kearsipan Indonesia*. Jakarta: Sigma Cipta Utama.
- Jeurgens, Charles. "Information on the Move". *Colonial Legacy in South East Asia; the Dutch Archives*. Juergens, Charles; Kappelhof, Ton; and Karabinos, Michael (eds.). 's Gravenhage: 2012.
- Mu'jizah. 2009. *Iluminasi dalam Surat-Surat Melayu Abad ke-18 dan ke-19*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Pratama, Raistiwar. 2012. "Melampaui Autentikasi; Kajian atas Arsip Proklamasi dan Supersemar". *Media Kearsipan Nasional Edisi 61*.
- Sijpestein, Petra. "Archival Mind in Early Islamic Egypt; Two Arabic Papiry". Sijpestein, Petra (ed.). *From alAndalus to Khurasan*. 2006. Leiden: Brill.
- Heidhues, Mary Somers. 1998. "The Two Sultans of Pontianak". *Archipel Volume 56*.